

ABSTRAK

Yusuf Faisal Ali. *Kepemimpinan Negara dan Pemerintahan Menurut Madzhab al-Syāfi'ī*.

Disertasi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa sekalipun Indonesia bukan negara Islam namun dikenal sebagai salah satu negara muslim yang terbesar di dunia dengan mayoritas berpaham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dan menganut madzhab al-Syāfi'ī. Namun dalam praktik kepemimpinan negara dan pemerintahan di Indonesia perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan konsistensi atas madzhab yang dianutnya dalam bidang kenegaraan dan pemerintahan.

Pertanyaan penelitian dalam kajian ini meliputi tiga hal utama, yaitu: (1) bagaimana pandangan Imām al-Syāfi'ī dan para pengikutnya dalam memahami imāmah?; (2) bagaimana penerapan konsep imāmah yang di kembangkan Imām al-Syāfi'ī dan para pengikutnya dalam praktik politik kenegaraan dewasa ini?; (3) bagaimana kritik hukum Islam terhadap kepemimpinan negara dan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pandangan madzhab al-Syāfi'ī?

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu teori relasi agama dan negara sebagai *grand theory*, teori imāmah sebagai *middle rang theory*, dan teori istinbath hukum madzhab al-Syāfi'ī sebagai *applicable theory*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terkait dengan kepemimpinan negara dan pemerintahan menurut madzhab al-Syāfi'ī. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan alasan untuk mengidentifikasi konsep, asas-asas dan prinsip-prinsip yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī dalam kaitannya dengan kepemimpinan negara dan pemerintahan. Untuk lebih mempertajam pengkajian ini, juga digunakan tiga pendekatan lainnya sebagai penunjang, yaitu: *conceptual approach*, *comparative approach*, dan *historikal approach*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan simpulan yaitu: (1) dalam pandangan madzhab al-Syāfi'ī dengan teori imāmahnya dipahami sebagai institusi politik yang berlabel agama atau bernuansa syari'at yang meliputi kepemimpinan negara dan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang *religio-politik*, dan diaktualisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan negara; (2) penerapan konsep imāmah yang dikembangkan al-Syāfi'ī dan pengikutnya dalam praktik politik kenegaraan bersifat elastis, fleksibel, dinamis tanpa menunjuk bentuk dan sistem tertentu, dan senantiasa dapat diadaptasikan sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at, dan tanpa mengabaikan tujuan dari institusi imāmah itu sendiri; dan (3) kepemimpinan negara dan pemerintahan dalam kognisi madzhab al-Syāfi'ī, apabila dikaitkan dengan praktik dan penerapannya di Indonesia dipandang inkonsisten dan memerlukan adanya perbaikan dan pembenahan lebih lanjut, terutama menyangkut persyaratan bagi calon presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintahan antara lain berkenaan dengan syarat muslim, aspek gender dan standar pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan syari'at dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam kajian ini juga diperoleh beberapa temuan, baik secara konseptual maupun dalam konteks penerapan politik kenegaraan di Indonesia, yaitu: (1) menguatkan tesis bahwa konsep dan teori imāmah atau kepemimpinan negara dan pemerintahan yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī dalam pemetaan pengkajiannya dipandang konsisten dengan metodologi yang dianutnya; dan (2) dalam konsep dan teori imāmah yang dikembangkan madzhab al-Syāfi'ī secara implisit terkandung tiga prinsip utama, yaitu: (a) adanya prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) dalam kaitannya dengan relasi antara agama dan negara, konsep imāmah menganut prinsip keseimbangan dinamis atau berada pada posisi paradigma *simbiotik*, sebagai jalan tengah antara sekularisme dan teokrasi; dan (c) adanya prinsip distribusi kekuasaan politik, baik menurut tingkatnya maupun fungsinya. Ketiga prinsip tersebut dalam konteks penerapannya di Indonesia masih sesuai dan relevan dengan UUD NRI 1945.